

Pancasila Dalam Bingkai Pemikiran Soekarno (Fondasi Moral Dan Karakter Bangsa)

Dr. Aminuddin, S.Sos, MA
aminuddinmarpaung@yahoo.com

Abstract

Ideology is a set of values (norms) or basic value systems that are comprehensive and deep that are owned and held by a society or nation as their insight or outlook on life. Pancasila is an ideology for the Indonesian people because Pancasila is a belief that is considered the most appropriate in carrying out the state system of the Republic of Indonesia. The Pancasila principle that was explored by Sukarno is still firmly planted in the hearts of the Indonesian people, so that it remains a character that is cultured in Indonesian nationality. One of the dimensions of the civilizing movement, which also means its practice in real life is the development of thoughts about the values of Pancasila which remain within the framework of the paradigm or the real content of essence and serve as a foundation in shaping the morals and character of a multicultural Indonesian nation, so that harmonious relations in diversity the nation is maintained. For this reason, in defending the ideology of national culture, of course, with efforts to re-instill an understanding of the values of Pancasila as the philosophy of the Indonesian State.

Key Word: Soekarno, Pancasila. Paradigm

Abstrak

Ideologi merupakan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Prinsip Pancasila yang digali oleh Soekarno hingga kini masih tertanam kokoh di hati rakyat Indonesia, sehingga tetap menjadi watak yang berbudaya kebangsaan Indonesia. Salah satu dimensi gerakan kebudayaan, yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila yang tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakekat yang sesungguhnya dan dijadikan fondasi dalam membentuk moral dan karakter bangsa Indonesia yang multikultural, sehingga hubungan harmonis dalam keberagaman bangsa tetap terjaga. Untuk itu, dalam mempertahankan ideologi budaya kebangsaan tentunya dengan upaya menanamkan kembali pemahaman nilai-nilai dari Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia.

Key Word: Soekarno, Pancasila. Paradigma

A. Pendahuluan

Sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentunya Pancasila sudah melewati banyak tahapan untuk menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pembentukan Pancasila berawal dari sidang pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945) yang menghasilkan 3 rumusan/rancangan awal dari Pancasila, yang kemudian rancangan tersebut dibahas lebih lanjut oleh Panitia Sembilan (22 Juni 1945) yang menghasilkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), dan 18 Agustus 1945 PPKI merumuskan ulang Sila Pertama Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tentu perjuangan Pancasila untuk tetap menjadi dasar negara tidak sampai di situ saja. Setelah diresmikannya, Pancasila masih mendapatkan penolakan dari Gerakan-gerakan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham kelompok mereka, seperti Gerakan pemberontakan DI/TII dan hingga puncaknya adalah pemberontakan G30S/PKI pada 1965, yang dimana setelah selesainya pemberontakan itu pada 1 Oktober 1965 Pancasila masih berdiri kokoh sebagai dasar negara dan 1 Oktober di peringati sebagai hari Kesaktian Pancasila.¹

Dalam upaya penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman yang ekstrem. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru. Untuk memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan pengakaran ideologi, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata-kelola dengan benar.

Pengakaran Pancasila yang dimaksudkan ialah dengan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai pedoman menggali ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas

¹Siti Afiyah, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015), h. 12. .

sosial, menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Proses pengakaran itu dimaksudkan untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan yang bermoral dan dalam ketatanegaraan, sanggup memenuhi kebutuhan praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional.

Pancasila dipilih sebagai dasar negara bukan tanpa dasar. Pancasila di pilih sebagai dasar negara yang beragam ini karena Pancasila adalah dasar negara yang ideal bagi Indonesia yang merupakan negara dengan banyak keaneka ragaman. Pancasila mampu mengatasi keberagaman bangsa ini dengan tetap toleran terhadap keberagaman yang ada dan juga tidak menghapuskan beragaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Untuk itu kelayakan Pancasila sebagai dasar negara tidak perlu dipertanyakan lagi, Pancasila sebagai dasar negara sudah menunjukkan kemampuannya untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia.

B. Biografi Singkat Soekarno

Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur.² Soekarno yang akrab di panggil Bung Karno memiliki nama kecil yaitu Kusno Sosrodiharjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa Timur. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali.³ Bung Karno adalah benar-benar menjadi putera Sang Fajar.⁴

Soekarno adalah keturunan Teosofi Jawa, dan ibunya adalah seorang penganut Hindu Bali. Keluarga Soekemi Nyoman Rai adalah campuran suku Jawa dan Bali, antara dua keluarga yang beda agama, Islam dan Hindu, walaupun akhirnya

²Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011), h. 3.

³Soekarno menuturkan bahwa kedua orang tuanya telah banyak berperan dalam hal pembentukan kepribadiannya, dari kedua orang tuannya Soekarno mendapat pengajaran-pengajaran tentang kehidupan dan disiplin, meliputi tata krama, sopan santun, rasa welas asih, toleransi, rasa senasib sepenanggungan, semangat manunggal dan menganyomi sesama. Menurut Soekarno nilai-nilai yang diserap dari orang tuanya sangat membantu dalam berorganisasi dan pembentukan karir politiknya. Argawi Kandito, *Soekarno The Leadership Secret of* (Depok: Oncor, 2011), h. 4.

⁴Disebut putera Sang Fajar karena beliau lahir pada saat itu ada dua macam fajar yang terjadi yaitu fajar yang sedang menyingsing ketika Bung Karno lahir, dan fajar abad baru 1901. Falsafah orang Jawa menyebut bahwa seseorang yang lahir pada saat fajar menyingsing hingga matahari terbit adalah ditakdirkan menjadi orang besar, orang yang akan menjadi pemimpin kaumnya. Sementara itu, dalam tradisi Islam, salah satu sabda nabi Muhammad saw bahwa setiap permulaan abad baru, Tuhan mengutus kepada umat manusia seorang pemimpin yang melepaskan kaumnya dari kebodohan, kejumudan menuju ke alam pencerahan dan pembaharuan Maksudnya disini, Pemimpin yang ditakdirkan Tuhan lahir untuk bangsa Indonesia pada abad baru itu adalah Bung Karno. Bangsa Indonesia pada abad 19 tengah mengalami puncak penderitaan akibat penjajahan, tercampak dalam kebodohan, kemelantaran dan kemiskinan. Mereka adalah suatu bangsa yang memang sedang menunggu lahirnya sosok pemimpin yang mampu mempersatukan mereka guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan segala dampak negatifnya itu. Cindy Adam, *Penyambung Lidah Rakyat* (Jakarta: PT Media Pressindo, 2011), h. 21.

Nyoman Rai pindah agama menjadi Muslimah. Keluarga yang melahirkan Soekarno adalah keluarga perjuangan sekaligus keluarga kebangsaan. Belajar dari rumah tangga orangtuanya, maka sejak kecil Soekarno memahami pluralitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, menganut beragam agama, dan memiliki aneka budaya dan bahasa, sebagaimana semboyan Bhineka Tunggal Ika.⁵

Ketika kecil hidup Soekarno sudah diisi dengan semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orangtuanya di Blitar. Kemudian ia tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung Jawa Timur. Pendidikan formal Soekarno untuk pertama kalinya dijalani di Sekolah Desa di Tulung Agung, tatkala ia masih bersama kakeknya. Ayahnya merupakan seorang pendidik. Ia adalah seorang guru yang keras. Sekalipun telah berjam-jam belajar, Soekarno masih selalu disuruh ayahnya untuk belajar membaca dan menulis. Hal ini dilakukan ayahnya setelah Soekarno pindah sekolah dari Tulung Agung ke Sekolah Angka Dua (*angka Loro*) di Sidoarjo. Pada waktu berusia 12 tahun, ia pindah ke Sekolah Angka Satu di Mojokerto dan duduk di kelas 6. Di sana ia menjadi murid yang terpandai.

Karena kecerdasannya yang gemilang itu, Soekarno dipindahkan ayahnya ke *Europeese Lagere School* (ELS) Mojokerto dan turun kelas lima. Di sekolahnya yang baru ini, Soekarno sangat giat belajar ilmu bahasa, menggambar dan berhitung. Pada usia 14 tahun seorang teman ayahnya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan di *Hoogere Burger School* (H.B.S)⁶, sambil mengaji sampai tamat. H.B.S setara dengan Mulo AMS atau SMP atau SMA. Namun hanya 5 tahun. Di H.B.S Surabaya ketika itu, dari lebih 100 murid hanya 20 orang yang pribumi.⁷ Berkat ia tinggal dan memperoleh pendidikan di rumah Tjokroaminoto, politisi kawakan itu, jiwa nasionalisme dan patriotisme Soekarno mulai membara. Hal ini, karena ia banyak bertemu dengan para pemimpin sarekat Islam, suatu kesempatan untuk lebih mengenal gagasan kebangsaan dan belajar politik dari mereka.

⁵Haq, *Pancasila*, h. 6.

⁶HBS adalah sebuah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau Elit Pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Pada waktu itu, HBS hanya ada di beberapa kota yakni Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta dan Medan. Sedangkan AMS ada di kota Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta dan Surabaya.

⁷Roso Daras, *Bung Karno; The Other Stories 2* Serpihan 'Sejarah yang Tercecer' (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 8.

Ketika berada di Surabaya itulah, Soekarno menjalani masa mudanya dan mengaku tertarik dengan isi buku Orison Swett Marden, yang menganjurkan kepada pemuda “*cantumkanlah (gantungkanlah) cita-citamu setinggi langit*”. Sejak umur 15 tahun semboyan tersebut telah menapasi semangat perjuangan Bung Karno berdasarkan sebuah cita-cita luhur. Cita-cita itu juga sering dibahas oleh para tokoh dan pemuda yang datang ke rumah Tjokroaminoto, yakni cita-cita mengenai tanah air dan bangsa sendiri, cita-cita untuk membuat tanah air Indonesia menjadi tanah air yang makmur dan menjadi negara merdeka yang kuat, sebagai bangsa-bangsa lain, yakni cita-cita untuk mengadakan suatu masyarakat yang dapat menjamin kebahagiaan semua anggota-anggotanya yaitu Indonesia Raya.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka bagi Soekarno muda, bangsa Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama 300 tahun harus melakukan perubahan dalam arti bangkit dan lahir kembali (*regeneration*) atau peremajaan (*rejuvenation*). Dalam proses mencari motivasi kebangkitan itulah, Soekarno bertemu dengan K.H. Ahmad Dahlan, pendiri dan pemimpin Muhammadiyah yang kala itu datang bertabligh di Surabaya. Soekarno mengaku bahwa tabligh yang disampaikan oleh K. H. Ahmad Dahlan berisikan cita-cita kebangkitan kembali. Cita-cita kebangkitan Islam itu sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebab menurut penyaksian Soekarno, sebahagian besar umat Islam di negeri lain yang masih jumud dan belum bangkit tak dapat lepas dari penjajahan. Maka anjuran Ahmad dahlan kepada umat Islam untuk bangkit, lepas dari jumud dan khurafat adalah berarti membangun semangat kebangkitan bangsa Indonesia untuk merdeka.⁸

Gelora kebangsaan dan interaksi politik Soekarno semakin berkembang dan matang setelah ia melanjutkan studinya ke *Technische Hogeschool* (ITB) di Bandung pada tahun 1920. Selama lebih kurang 6 tahun belajar di sekolah tersebut, ia kemudian berhasil mendapat gelar insinyur 25 Mei 1926. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker yang saat itu merupakan pimpinan organisasi *Indische Partij*.⁹

Ia mendapat pendidikan Barat Sekuler dan aktif dalam kegiatan politik sejak usia muda, hingga mencapai puncaknya sebagai proklamator dan sebagai Presiden

⁸Robit Narul Jamil, et.al. *Soekarno's Idea About Indonesian Revolution in 1945-1957*. Jakarta: Jurnal Historis, Vol. 1, 2017.

⁹Hero Triatmoro, *Kisah Istimewa Bung Karno* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 289.

Republik Indonesia. Disamping banyak membaca buku berkaitan dengan politik dan ideologi karya para cendekiawan Barat (terutama yang aliran sosialis), ia juga banyak dipengaruhi para pemikir Islam, dalam dan luar negeri terutama melalui bacaan.

C. Pembahasan

Soekarno menyatakan bahwa beliau hanyalah sebagai perumus dan bukan pencipta Pancasila. Sebab, Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila itu telah lama terurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia.¹⁰ Pancasila tidak lepas dari eksistensi manusia Indonesia.

Pancasila berisi prinsip dasar, selanjutnya diterjemahkan dalam konstitusi UUD 1945 yang menjadi penuntun sekaligus rambu dalam membuat norma-norma sosial politik. Produk kebijakan politik pun tidak boleh bersifat apriori, bahkan harus merupakan keputusan demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa bangsa, tidak memiliki sifat totaliter dan tidak boleh digunakan sebagai “stempel legitimasi kekuasaan”. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan mampu menjadi “leidstar”, bintang penuntun dan penerang, bagi bangsa Indonesia. Pancasila selalu relevan di dalam menghadapi setiap tantangan yang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika aspirasi rakyat. Namun, tentu saja implementasi Pancasila tidak boleh terlalu kompromistis saat menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, guna meng-eksplisitkan ide dan gagasan agar menjadi konkret, dan agar Pancasila tidak kaku dan keras, dalam merespon keaktualan problematika bangsa, maka instrumen implementasinya pun harus dijabarkan dengan lebih nyata, tanpa bertentangan dengan filsafat pokok dan kepribadian bangsa.¹¹

Dasar falsafah negara yang diuraikan Soekarno bersumber dari sistem eksistensi manusia Indonesia dan paham kekeluargaan. Sistem eksistensi manusia Indonesia¹²: *“Di dalam hukum adat manusia sama sekali bukan individu terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri.”* Di dalam hukum adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Karena, menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Di dalam kesadaran rakyat kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Dengan menggunakan perspektif hukum adat, filsafat yang mendasari sistem manusia Indonesia adalah suatu filsafat khas yang “tidak

¹⁰Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (Depok: Prenamedia Grup, edisi 1, 2018), h. 5.

¹¹Putu Merta Surya Putra, *Pidato Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-44 PDIP* (Jakarta: Liputan6.com 10/6/2020).

¹²Soepomo dalam Kartohadiprodjo, *“Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”*, dalam Majalah Gatra, vol. 19, no. 30 2013, h. 91-92.

Barat” dan “tidak Timur”, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran *mufakat, pantun-pantun, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan*.¹³ filsafat manusia Indonesia sebagai “...*kekayaan budaya bangsa kita sendiri... yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri...*” atau, dalam ungkapan Pramono, filsafat manusia Indonesia berarti “...*pemikiran-pemikiran... yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah...*”.¹⁴ Jadi, filsafat manusia Indonesia ialah semua pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan kelompok-kelompok etnis masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sistem dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Manusialah yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia pula yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-kesatuan Indonesia, ber-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Perkataan “kekeluargaan” merupakan kata sifat yang berasal dari kata “keluarga” yang merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. “kekeluargaan” adalah paham yang asalnya dari keluarga sebagai suatu kesatuan pergaulan hidup yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda satu sama lain.¹⁶ Pemikiran Pancasila yang berpangkal pada pendirian bahwa manusia dilahirkan untuk hidup berkelompok, merupakan suatu kesatuan, tanpa mengabaikan adanya perbedaan yang terdapat di dalamnya. Atau, dengan kata lain, suatu kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan. Dengan demikian, paham kekeluargaan yang merupakan prinsip dasar manusia Indonesia dalam berinteraksi dan berinterelasi dapat didefinisikan sebagai: tekad, keinsafan, dan kesadaran kolektif untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan seorang kepala dan di bawah penilikan para anggotanya.

1. Pancasila Dalam Pemikiran Soekarno

Soekarno sebagai tokoh penggali Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia tercantum baik dalam beberapa dokumen sejarah maupun dalam Peraturan Perundangan Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah dirangkum oleh Gatut Saksono bahwa pokok-pokok pikiran dari pidato Soekarno yang mengemukakan pendapatnya tentang Dasar Negara Indonesia merdeka disebutkan di depan Ketua

¹³Nasroen, *Falsafah Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967), h. 15.

¹⁴Nasroen, *Falsafah*, h. 15.

¹⁵Notonegoro dalam Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), h. 45.

¹⁶Kartohadiprojo. *Pancasila*, h. 16.

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Pidato 1 Juni 1945, yang berbunyi:

"Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda *Philosophische Gronslaf* daripada Indonesia merdeka. *Philosophische Gronslaf* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi"¹⁷

Sesudah menyampaikan ulasan mengenai arti Merdeka guna tekad untuk mewujudkan Indonesia merdeka, Soekarno meneruskan pembicaraan mengenai Dasar Negara. Hal ini yang di rangkum Pranarka, dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, yaitu:¹⁸

"Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *Philosophische Gronslaf*, atau jikalau Ketua Mulia meminta sesuatu *Weltanschauung* atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu.... Apakah *Weltanschauung* kita, kalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?"

Kemudian mulailah Soekarno memaparkan pandangannya mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Pada urutan *pertama* disebutkan dasar "kebangsaan".

"Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia merdeka ialah dasar *kebangsaan*. kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia".

Sebagai dasar *kedua* disebutkan *internasionalisme*, Sesudahnya Soekarno mengemukakan bahaya-bahaya yang dapat timbul dari nasionalisme.

"Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan *internasionalisme*".

Dasar *ketiga* yang dikemukakan oleh Soekarno adalah *dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan*.

¹⁷C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* yang dikutip oleh Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno* Yogyakarta: CV. Urna Cipta Media Jaya, 2007), h. 19. Lihat juga Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I (Jakarta: Panitia DBR, 1963), h. 4.

¹⁸ Pranarka, A.M.W, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1985), h. 31-33. Hal ini juga diuraikan secara detail oleh Benhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: IKAPI, 1987), h. 409-410.

"Kemudian, Apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua', 'semua buat satu'. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia merdeka adalah permusyawaratan perwakilan."

Dasar yang *keempat* adalah kesejahteraan, Soekarno berkata:

"Prinsip no. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.... maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi, kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya."

Akhirnya Prinsip *kelima* diutarakan oleh Soekarno yaitu prinsip *Ketuhanan*.

"Saudara-saudara, Apakah prinsip ke-5? Telah mengemukakan 4 prinsip: 1. kebangsaan Indonesia; 2. internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw., orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan."¹⁹

Setelah menguraikan pendapatnya mengenai lima dasar negara Indonesia tersebut, Soekarno kemudian berbicara tentang nama dasar negara itu. Singkatnya tata urut dalam rumusan Pancasila Soekarno adalah:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan.

¹⁹Saksono, *Pancasila*, h. 21-25.

"Saudara-saudara! dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, Inilah Panca Dharma? bukan! nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, kita membicarakan dasar... namanya bukan Panca Dharma. tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, **kekal dan abadi**."

Dalam peristiwa 1 Juni 1945 yaitu Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar Dasar Negara Indonesia merdeka. Untuk pertama kalinya, pemikiran tentang Pancasila baik dalam pengertian nama maupun dalam pengertian isinya, secara eksplisit dan terurai dicetuskan dan tercatat dalam sejarah.

2. Pancasila Dalam Dokumen-Dokumen Sejarah²⁰

- a) Dalam alinea IV naskah politik bersejarah tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan undang-undang Dasar 45 yang dikenal dengan piagam Jakarta.**

Untuk melaksanakan tugasnya BPUPKI telah membentuk beberapa Panitia kerja antara lain:

1. Panitia Perancang UUD yang berhasil menyusun rancangan UUD RI .
2. Panitia Kecil (perumus) terdiri atas 9 orang. Panitia ini pada 22 Juni 1945 berhasil menyusun sebuah naskah politik yang bersejarah yang kemudian pada 18 Agustus 1945 dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD 1945.

Dalam naskah politik tanggal 22 Juni 1945 itu untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara dicantumkan tertulis dalam alinea ke-4 dengan rumusan dan tata urutan sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁰ Saksono, *Pancasila*, h. 20-27.

b) Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 di Jakarta disaksikan oleh PPKI tersebut.

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang memutuskan:

1. Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945;
2. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945;
3. Memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua PPKI. Terpilih masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, sekaligus ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama;
4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat (KNP).

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan, juga menetapkan pembentukan departemen-departemen pemerintahan.

Dalam alinea IV dari Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi dan sah menurut hukum sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan 2 macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu menjadi dasarnya, karena pembukaan lah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia itu, kedua memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baik yang tertulis di

UUD maupun yang konvensi, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.

c) Dalam alinea IV Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (konstitusi RIS) 27 Desember 1949.

Bersamaan dengan KMB di kota Den Haag, Belanda, di susun konstitusi RIS yang mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Walaupun bentuk Negara Indonesia telah berubah negara kesatuan menjadi negara serikat dan konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda, Pancasila tetap tercantum sebagai dasar filsafat negara di dalam alinea IV mukadimah Konstitusi RIS 1949 dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perikemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

d) Dalam alinea IV Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS-RI) 17 Agustus 1950.

Usia negara RIS tidak sampai 1 tahun umurnya. Semenjak Proklamasi 1945 bangsa Indonesia menghendaki Negara Kesatuan, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi. Pada waktu pemerintahan RIS, terdengar pernyataan rakyat dengan menuntut pembubaran RIS. Berdasarkan hasrat dan desakan rakyat Indonesia itulah pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno (Presiden RIS) memproklamasikan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti pembubaran RIS. Pada saat itu juga oleh suatu panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, Konstitusi RIS-196 pasal diubah menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI 1950 yang terdiri dari 147 pasal. Perubahan bentuk negara dan Konstitusi RIS tidak mempengaruhi Pancasila. Sebagai Dasar Filsafat Negara, Pancasila tetap tercantum dalam alinea IV Mukadimah UUDS-1950, dengan urutannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perikemanusiaan;

3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

e) Dalam Pembukaan (alinea IV) Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah suatu konstitusi yang bersifat sementara. Pada tahun 1955 untuk pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota anggota DPRD dan konstituante yang akan menyusun UUD baru. Namun selanjutnya konstituante tidak berhasil menetapkan suatu UUD yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal dengan istilah Dekrit Presiden. Isi pokok dari Dekrit itu adalah tentang pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.²¹ Dengan berlakunya kembali UUD 1945, otomatis Pancasila demi hukum tetap menjadi Dasar Filsafat Negara dengan perumusan dan tata urutan yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

3. Pancasila Sebagai Fondasi Moral dan Karakter Bangsa Indonesia

Baru-baru ini terjadi isu tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh anggota DPR RI. Dengan adanya isu ini, banyak respon masyarakat Indonesia, baik itu dari kalangan sejarawan, masyarakat umum, kaum terdidik, praktisi politik, peserta didik, dan akademisi, yang tidak setuju dengan rancangan revisi tersebut. Debat ilmiah pun terjadi dimana-mana. Melalui respon penolakan ini, bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila yang tertuang dalam lima sila dasar sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak perlu ada perubahan Pancasila menjadi *Trisila* dan *Ekasila*. Menurut penulis, butir-butir kelima sila Pancasila yang di gali oleh Soekarno sudah tertanam di

²¹Himawan Indrajat, *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*. Unila Jurnal Sosiologi, Vol. XVIII, 2016.

sanubari rakyat Indonesia sejak Indonesia merdeka dan sudah mendarah daging serta menjadi watak untuk rakyat Indonesia.

Salah satu dimensi gerakan kebudayaan, yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata, adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakekatnya yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu pengembangan pemikiran itu bukanlah dimaksudkan untuk merubah atau merevisi, apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantap dan mengembangkan penghayatan, kebudayaan dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 seperti itu diharapkan bangsa Indonesia akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep dan bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidang kehidupannya yang bersumber dari ideologi dan konstitusi bersama, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman.

Dalam Pidato-pidato Soekarno, dapat ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak bagaimana cara menamamkan pancasila sebagai fondasi moral dan karakter bangsa Indonesia, melalui sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut:²²

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pernyataan penting Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta, dan manusia adalah ciptaan. Relasi ini kembali ditegaskan dalam pernyataan kemerdekaan karena pernyataan itu penting dalam hidup bangsa yang merdeka. Kemerdekaan hanya bisa bersandar pada refleksi bahwa tidak boleh ada penghambaan oleh manusia satu atas manusia yang lain. Kalau sebuah bangsa berjuang untuk lepas dari penjajahan, maka sekali merdeka, bangsa itu haruslah membangun solidaritas antar manusia, dan pada akhirnya membangun kehidupan bersama yang lebih baik bagi semua.

²²Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila Epistimologi Keislaman Kebangsaan* (Depok: Prenamedia Grup, edisi 1, 2018), h. 19.

Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri... marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.

Marilah kita amalkan, jalankan agama... dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.” “...sudah saya lihat secara historis, sudah saya lihat dari sejarah kegamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang sebagai yang kita kenal di dalam agama-agama kita. Dan formulering Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuat salah satu elemen yang mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya.²³

Penjabaran dari Soekarno ini bertujuan untuk mendorong interaksi yang kuat dan terus-menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disadari bahwa keragaman agama dan kepercayaan adalah suatu kenyataan bangsa Indonesia, dan pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa menjadi amat penting untuk mengakui bahwa yang paling penting adalah “manusia”-nya. Tuhan Yang Maha Esa dimuliakan jika manusia satu memuliakan yang lain. Fondasi ini juga memberikan landasan moral atas hal-hal penting dalam demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu partisipasi, pemberdayaan, pemajuan harkat hidup manusia, dan keterbukaan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Soekarno dan Bung Hatta mengakui bahwa Indonesia telah mempunyai akar demokrasi. Sejarah Indonesia menyediakan banyak rujukan bagaimana demokrasi itu berkembang, dan terus dikelola dalam pranata masyarakat. Namun, para proklamator ini mengingatkan, bahwa pada akhirnya, “manusia” adalah penting. Adalah menjadi ironi seandainya Indonesia merdeka, tetapi dalam proses kehidupan internasional, Indonesia terlibat langsung atau tidak langsung sehingga membuat bangsa lain hidup dalam kesengsaraan.

“Lebih dulu saya mau menerangkan kepada saudara-saudara bahwa dengan sengaja kita selalu memakai perkataan kemanusiaan dalam perikemanusiaan. Kemanusiaan adalah alam manusia ini. De mensheid. Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia ada hubungannya, jiwa yang hendak mengangkat membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang...”

“... Di satu pihak terjadinya negara-negara nasional dan bangsa-bangsa, di lain pihak perhubungan yang makin rapat antara manusia dan manusia dan antara bangsa dan

²³Soekarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Gramedia Widiasarana bekerjasama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, 2001), h. 31.

bangsa. Saudara-saudara sehingga jikalau kita mau berdiri sendiri sebagai bangsa tak mungkin, dunia telah menjadi demikian. Maka oleh karena itu kitapun di dalam Republik Indonesia ini yakin di dalam tekad kita ini tidak hanya ingin mengadakan satu bangsa Indonesia yang hidup dalam masyarakat adil dan makmur. Tidak. Tapi kita di samping itu bekerja keras pula untuk kebahagiaan seluruh umat manusia... Bahkan kita yakin masyarakat adil dan makmur tak mungkin kita dirikan hanya di dalam lingkungan bangsa Indonesia saja. Masyarakat adil dan makmur pada sistemnya adalah sebagian daripada masyarakat adil dan makmur yang mengenai seluruh kemanusiaan..”

“... nasionalisme yang hidup di dalam suasana perikemanusiaan: nasionalisme yang mencari usaha agar segala umat manusia ini akhirnya nanti hidup dalam satu keluarga besar yang sama bahagiannya.”²⁴

3. Persatuan Indonesia

Prinsip kebangsaan Indonesia mempunyai fondasi yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ketika diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Republik Indonesia dirujuk untuk mewujudkan demokrasi Pancasila meski prosesnya amat sulit. Ketimpangan sosial dan ketimpangan sosial politik membuat demokrasi yang berdasarkan Pancasila direduksi hanya menjadi alat.

Dalam kaitan itu Soekarno menegaskan bahwa yang menjadi alat adalah negara, sedangkan kebangsaan adalah fondasi bukan sebaliknya.

“Kalau umpamanya sila kebangsaan dibuang, umpama, apa yang menjadi pengikat rakyat Indonesia yang 82 juta sekarang nantinya lebih. Apa? Ketuhanan Yang Maha Esa? Ya, bisa! Cita-cita untuk keadilan sosial? Ya, bisa! Tapi dalam realisasinya, Saudara-saudara, realisasi yang segi negatif menentang imperialisme, realisasi yang segi positif menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur itu, kalau tidak ada binding kebangsaan itu, kita tidak akan bisa kuat. Menentang imperialisme sebagai segi negatif penentangan ialah negatif hanya bisa dengan cara yang kuat kalau segenap bangsa Indonesia menentang dengan rasa itu tadi: Kami ingin merdeka, kami adalah satu bangsa, kami adalah satu rakyat yang menderita bersama-sama akibat daripada penjajahanmu. Jikalau rasa kebangsaan ini tidak ada, barangkali kita belum bisa sampai sekarang ini mendirikan negara yang merdeka.”²⁵

Barangkali paling-palingnya menjadi negara-negara yang kecil, kruimel staten“Inilah arti daripada Negara Nasional Indonesia. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau kita menghendaki negara kita ini kuat, dan sudah barang tentu kita menghendaki negara kita ini kuat, oleh karena kita memerlukan negara ini sebagai alat perjuangan untuk merealisasikan satu masyarakat adil dan makmur, kita harus dasarkan negara ini antara lain di atas paham kebangsaan.”²⁶

²⁴Soekarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, h. 35.

²⁵Soekarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, h. 40.

²⁶Soekarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah proses yang melibatkan seluruh proses sejarah kebangsaan Indonesia, dan menjadi proses penting kenegaraan Indonesia. Proses, dan bukan alat, itulah yang ditekankan oleh seluruh konstruksi dan pranata kenegaraan, mulai dari UUD 1945, kebijakan publik yang menyentuh masalah interaksi antara kelompok etnis dan sosial-politik, yang menyelenggarakan kesejahteraan, dan yang menjadi inti “musyawarah” dalam demokrasi Pancasila.²⁷

“... Demokrasi bagi kita sebenarnya bukan sekadar satu alat teknis, tetapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita. Tetapi kita harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran kita itu di atas kepribadian kita sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur...”

“Tetapi di dalam cara pemikiran kita atau lebih tegas lagi di dalam cara keyakinan dan kepercayaan kita, kedaulatan rakyat bukan sekadar alat saja. Kita berpikir dan merasa bukan sekadar hanya teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional dan secara kekeluargaan.

“Di dalam alam pikiran dan perasaan yang demikian itu maka demokrasi, bagi kita bukan sekadar satu alat teknis saja, tetapi satu “geloof”, satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagai yang kita cita-citakan.”²⁸

5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Dalam jangka panjang, sebuah bangsa harus membangun kemandirian dan pemberdayaan diri. Tantangan dunia terus berkembang sehingga mengharuskan suatu bangsa untuk terus mengevaluasi diri, sebab sering kali tantangan dunia tadi memojokkan suatu bangsa sampai bertekuk lutut. Untuk ini, keadilan sosial menjadi syarat penting kemandirian dan pemberdayaan diri. Syarat bagi segala kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kezaliman dan pencideraan, kekuasaan itu tidak bisa kekal.

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945* (Jakarta: Kongres Pancasila III, 2011), h 67.

²⁸Asshiddiqie, *Membudayakan*, h. 68.

E. Kesimpulan

Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dalam upaya mempersatukan bangsa yang multikultural, nilai-nilai lima sila Pancasila dijadikan jembatan penghubung dalam hidup berkelompok, tanpa mengabaikan adanya perbedaan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, pokok-pokok yang harus dilakukan dari masa ke masa yaitu menanamkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, yakni tetap mengokohkan semangat untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang berkebangsaan, berdaulat, adil dan makmur dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral dan karakter bangsa Indonesia.

Daftar Bacaan

- Adam, Cindy. *Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: PT Media Pressindo, 2011.
- Afiyah, Siti. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Kongres Pancasila III, 2011.
- Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Jakarta: Gramedia Widiasarana bekerjasama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, 2001.
- Dahm, Benhard. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: IKAPI, 1987.
- Daras, Roso. *Bung Karno; The Other Stories 2 Serpihan 'Sejarah yang Tercecer'*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
- Haq, Hamka. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kandito, Argawi. *The Leadership Secret of Soekarno*. Depok: Oncor, 2011.
- Saksono, Ign. Gatut. *Pancasila Soekarno* Yogyakarta: CV. Urna Cipta Media Jaya, 2007.
- Triatmoro, Hero. *Kisah Istimewa Bung Karno*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan*. Depok: Prenamedia Grup, edisi 1, 2018.

Jurnal

- Himawan Indrajat, *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*. Unila Jurnal Sosiologi, Vol. XVIII, 2016.
- Kartohadiprodjo, "Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat", dalam Majalah Gatra, vol. 19, no. 30 2013.
- Robit Narul Jamil, et.al. *Soekarno's Idea About Indonesian Revolution in 1945-1957*. Jakarta: Jurnal Historicis, Vol. 1, 2017.
- Kartohadiprodjo, "Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat", dalam Jurnal Gatra Edisi No. 30 Tahun XIX, 30 Mei-5 Juni 2013.